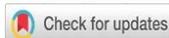




MANAJEMEN KEUANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Suroso^{1,*}, Slamet Untung², Moh. Muslih³

^{1,2,3}, Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v9i1.254>

Sections Info

Article history:

Submitted: April 28, 2024

Final Revised: May 2, 2024

Accepted: May 8, 2024

Published: May 14, 2024

Keywords:

Management;

Financial management;

Islamic educational institutions;

Financial syariah;

Efficient and effective.



ABSTRACT

This research aims to elucidate financial management within the context of Islamic educational institutions. Educational financial management refers to the professional and proportional process of organizing finances designated for the implementation of educational operational programs. Financial management is an integral part of school management that plays a crucial role in determining the course of educational activities within schools. The focus of this research is to comprehend the fundamental principles of financial management and how they are applied within the context of Islamic educational institutions. This research is conducted using qualitative methods, where data is obtained through library research aimed at understanding the messages contained within a text. The findings of this research indicate that financial management in Islamic education involves the allocation of resources to support educational operational activities, including financing planning, implementation of educational budgets, as well as recording and inspection or supervision of budget management in education. The main objective of educational financial management is the efficient and effective utilization of funds or budgets to achieve the desired educational goals.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manajemen keuangan dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Manajemen keuangan pendidikan merujuk pada proses profesional dan proporsional dalam mengatur pengelolaan keuangan yang diperuntukkan bagi program-program pelaksanaan operasional pendidikan. Manajemen keuangan merupakan bagian integral dari pengelolaan sekolah yang memiliki peran penting dalam menentukan jalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam manajemen keuangan serta bagaimana penerapannya dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana data diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang bertujuan untuk memahami pesan yang terkandung dalam suatu teks. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan dalam pendidikan Islam melibatkan proses alokasi sumber daya untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, yang mencakup perencanaan pendanaan, implementasi anggaran pendidikan, serta pencatatan dan pemeriksaan atau pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Tujuan utama dari manajemen keuangan pendidikan adalah penggunaan dana atau anggaran secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Kata Kunci: *Manajemen, Manajemen keuangan, Lembaga pendidikan islam, Keuangan syariah, Efektif dan efisien*

PENDAHULUAN

Keuangan merupakan komponen yang penting dalam lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Manajemen keuangan pendidikan memberikan atensi yang besar akan pentingnya tata kelola keuangan pendidikan Islam dalam peningkatan program sekolah, pelaksanaan guru dalam kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan akademis peserta didik.

Kepala sekolah sebagai perencana anggaran sekolah, harus memahami manajemen keuangan sekolah, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan semua kebutuhan sekolah. Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam sangat penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan sekolah. Seorang kepala sekolah harus memiliki ilmu pengetahuan tentang manajemen, khususnya manajemen keuangan, karena untuk menjalankan seluruh kegiatan yang ada di sekolah tidak terlepas dari pengolahan dana. Dana yang diperoleh atau diberikan oleh pemerintah maupun pihak lainnya memerlukan manajemen yang baik. Sebesar apapun dana sekolah bila tidak dikelola dengan manajemen yang baik, maka sekolah tersebut akan mengalami suatu kemunduran.

Manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam harus ditangani secara serius, sistematis, dan penuh tanggung jawab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena manajemen keuangan yang efisien akan memastikan adanya keuntungan bagi lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bagus, tentunya memiliki pengelolaan keuangan yang bagus pula guna mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Dalam rangka menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang efektif dan efisien melalui pengelolaan keuangan, maka sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis dan desain penelitian kualitatif deskriptif yang hasilnya berupa deskripsi mengenai hasil penelitian. Dengan menggunakan desain tersebut, penelitian ini akan menghasilkan deskripsi atau memberikan gambaran mengenai hasil analisis manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian dengan pendekatan kepustakaan (Library Research) atau yang biasa disebut studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode Pengumpulan data pustaka, dengan membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

Setelah penulis melakukan pengumpulan data, kemudian dibaca, dipelajari, difahami, dipilih, dan dikumpulkan serta dianalisis, maka pada tahap berikutnya adalah menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut. Pada tahap analisis data ini penulis menggunakan metode content analysis. Teknik content analysis, merupakan teknik penelitian yang bertujuan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan dari suatu teks secara sistematis dan objektif (Kriyantono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam

Maksud dari kalimat tersebut adalah hal utama dalam memajemen alam semesta adalah manajemen dari manusia itu sendiri. Manusia yang mampu menajemen dirinya

dengan baik akan mampu memajemen apapun dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memajemen keuangan di sekolah. Allah swt berfirman dalam QS al-Infithar: 10-12.

وَأِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “(1) Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), (2) yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu). (3) Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Semua tahapan dari manajemen keuangan telah dijelaskan dengan rinci dalam al-Qur’an. Maka penulis menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya dalam pelaksanaan manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam harus selalu berpedoman pada apa yang telah dijelaskan oleh al-Qur’an. Selain itu prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas juga sudah tercakup di dalam al-Qur’an. Penerapan manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam bisa dilihat dari kemampuan lembaga tersebut dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam mengatur keuangan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan.

Dalam berbagai ayat, Islam memang telah menekankan pentingnya manajerial yang professional, sistematis dan terstruktur sehingga hasil dapat dicapai secara optimal. Salah satunya termaktub dalam Al-Qur’an Surah As-Saff ayat 4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Ayat di atas mengajarkan manusia bahwa Allah mencintai manusia yang mampu melakukan suatu hal secara teratur, dalam berbagai hal ketika mencapai sebuah tujuan yang baik. Artinya, Islam sangat menekankan teraturnya suatu urusan, terlebih lagi terkait kepentingan umat. Sedangkan Pendidikan merupakan alah satu kebutuhan umat yang penting. Maka dalam manajemen keuangan yang menjadi salah satu bagian krusial dalam Pendidikan, perlu dikelola secara sistematis.

Selama ini ada kesan bahwa keuangan adalah segalanya dalam memajukan suatu lembaga pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, manajer lembaga pendidikan seakan tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan timbulnya perhatian yang besar pada keuangan, yaitu: Pertama, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program-program pembaruan atau pengembangan pendidikan bisa gagal dan berantakan manakala tidak didukung oleh keuangan yang memadai. Kedua, lazimnya uang dalam jumlah besar sulit sekali didapatkan khususnya bagi lembaga swasta yang baru berdiri (Mujamil Qomar, 2007).

Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Sulistyorini, 2009).

Manajemen keuangan pendidikan Islam mencakup tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan (budgeting), pelaksanaan (*accounting*), dan penilaian (*auditing*) atau evaluasi/pertanggungjawaban (Ramayulis & Mulyadi, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen pembiayaan pendidikan dimaksudkan

sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Menurut George R. Terry, menyatakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggantian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lain (Nur Gamar, 2019). Biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat diharga dengan uang (Ade Sopioli, 2018).

Manajemen keuangan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam menggerakkan para bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan keuangan (penganggaran), pengelolaan berupa pengeluaran (pencairan), penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi (organisasi), termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Intinya dari manajemen keuangan pendidikan, mengelola uang yang ada dan menyiapkan dan melaksanakan instrumen administratif untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien (M. Hidayat Ginanjar, dkk, 2020).

Di dalam terminologi administrasi keuangan, khususnya administrasi keuangan bidang pendidikan, dibedakan antara biaya (*cost*) dan pembelanjaan (*expenditure*). Biaya (*cost*) adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu, misalnya kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan, dan sebagainya. Sedangkan pembelanjaan (*expenditure*) adalah besar dana riil yang dikeluarkan untuk membiayai unit kegiatan tertentu, misalnya kegiatan praktikum siswa. Oleh karena itu, seringkali muncul adanya perbedaan antara biaya yang dianggarkan dengan pembelanjaan riil (Ahmad Munir, 2013).

Hongren menyebutkan bahwa, *school budgets are usually concerned with provision of goods and services for stakeholders and no intention of making profit. Their budgets are therefore aimed at authorizing expenditure and providing a ceiling for management actions* (Matula D. Phylisters, 2018). Maksud dari pernyataan tersebut adalah anggaran sekolah biasanya berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa bagi pemangku kepentingan dan tidak ada niat untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, anggaran mereka ditujukan untuk mengesahkan pengeluaran dan menyediakan ruang untuk tindakan manajemen.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada sekolah berasal dari tiga sumber, yaitu:

- a. Pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun daerah maupun keduanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan,
- b. Orang tua atau peserta didik,
- c. Masyarakat baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat (Tulusmono, 2012).

Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya, biaya pembelian atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain. untuk barang-barang yang tidak habis pakai (Sulistyorini, 2017).

Selain dua macam penggunaan dana tersebut, ada lagi satu macam yang harus dialokasikan, yaitu anggaran untuk kebutuhan atau kepentingan sosial baik bantuan sosial ke dalam maupun ke luar. Bantuan ke dalam dapat berupa dana untuk warga sekolah sendiri. Sementara itu, bantuan sosial keluar seperti untuk bencana alam, permohonan sumbangan dari luar, dan sebagainya (Aminatul Zahroh, 2017).

Prinsip Manajemen Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam

Manajemen keuangan sekolah perlu memerhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan (Nur Rahmah, 2016). Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

a. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah (Tulusmono, 2012).

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Dalam perspektif baru, akuntabilitas membawa dua konotasi: answerability dan enforcement. Answerability adalah kewajiban dari pengelola untuk menginformasikan publik dan menjelaskan atau menjustifikasi apa rencana yang sedang dikerjakan atau yang telah dikerjakan. Enforcement merupakan kemampuan organisasi untuk memberikan sanksi terhadap yang lalai dalam melakukan tugas dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja dengan baik (Irawan& Ahmad Noval, 2019).

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

(1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah; (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya; (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Disamping itu untuk memperoleh kepercayaan, pertanggungjawaban lembaga Pendidikan Islam juga harus mengacu pada Al-Qur'an Surah Al-Ma'un: 1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang menghardik anak yatim, artinya bersikap kasar, hingga menelantarkan dan mengabaikan merupakan seorang pendusta agama. Orang yang tidak memberi atau mendorong memberi makan pada orang miskin pun demikian. Artinya, Pendidikan yang merupakan alternatif manusia dalam menyambung kesejahteraan hidup harus berprinsip pada ayat ini. Pendidikan tidak boleh mengabaikan dan menelantarkan fakir miskin, yatim piatu yang tidak mampu. Sikap abai Pendidikan terhadap fakir miskin secara tidak langsung merupakan penyiksaan terhadap mereka. Maka seorang manajer Pendidikan Islam harus memiliki pemikiran yang terbuka terhadap wacana tersebut. Salah satu bentuk kepedulian Pendidikan Indonesia terhadap masyarakat miskin adalah Bantuan Operasional Sekolah. Tanggung jawab ini harus dimiliki oleh seluruh manajer Pendidikan khususnya Pendidikan Islam.

c. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiveness “characterized by qualitative outcomes”*. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

1) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya.

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan.

2) Dilihat dari segi hasil

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya (Tulusmono, 2012).

Perencanaan Anggaran di Lembaga Pendidikan Islam

Penyusunan/perencanaan anggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan (Arwildayanto, dkk, 2017). Penyusunan anggaran juga merupakan gambaran setiap kegiatan yang direncanakan sekolah agar dapat menentukan satuan biaya di setiap kegiatan sehingga membantu dalam mengarahkan lembaga pendidikan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Adapun fungsi anggaran diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu; Pertama, alat penafsir, yaitu memperkirakan besarnya pengeluaran dan pendapatan sehingga mengetahui kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam realisasi kegiatan di lembaga pendidikan. Kedua,

alat kewenangan, yaitu memberi kewenangan terkait dana yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan sesuai perencanaan anggaran. Ketiga, alat efisiensi, yaitu mengetahui kegiatan pendidikan yang dilaksanakan sesuai perencanaan anggaran secara efisien (Rita Pusvitasari & Mukhamad Sukur, 2020).

Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPD), Subsidi dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), donatur, badan usaha, serta sumbangan-sumbangan lain. Untuk sekolah-sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat secara luas.

Setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjutnya sekolah/ madrasah membuat RAPBS. Dalam penyusunan RAPBS kepala sekolah sebaiknya membentuk tim dewan guru. Setelah itu tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, memerinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Dalam menetapkan jumlah anggaran, dua hal yang perlu diperhatikan yaitu unit *cost* (satuan biaya) dan volume kegiatan, untuk anggaran rutin SBPP, BOS, jenis kegiatan dan satuan biayanya sudah ditentukan. Kepala sekolah bersama dengan staf sekolah diharapkan dapat menyusun prioritas penggunaan dana permata anggaran secara cermat (Sulistyorini, 2017).

Pelaksanaan Anggaran di Lembaga Pendidikan Islam

Pelaksanaan merupakan usaha mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan melalui penciptaan iklim kerja sama yang produktif. Pelaksanaan juga mengandung makna mengarahkan, memberikan dorongan, dan memerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah disusun pada tahap awal fungsi manajemen (Feiby Ismail, 2020).

Dalam menggunakan anggaran, ada azas yang lazim dijadikan pedoman yaitu azas umum pengeluaran negara, bahwa manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Azas ini tercermin dalam prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seperti efisiensi, pola hidup sederhana, hemat dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

Bendaharawan sekolah Islam dalam mengelola keuangan sekolah hendaknya memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hemat tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang telah disyaratkan
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan.
- c. Keharusan penggunaan kemampuan. Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak

Pengawasan Pelaksanaan Anggaran di Lembaga Pendidikan Islam

Pengawasan juga bisa disebut dengan kontrol manajerial merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi karena kelalaian untuk melakukan fungsi tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan yang dilakukan adalah kegiatan penilaian apakah manajemen keuangan pada sekolah sudah berjalan dengan baik atau belum. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam upaya melakukan perbaikan di masa yang akan datang (Inten Nurmalasari, 2019).

Pelaksanaan anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Agar pengawasan bisa berjalan secara efektif ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Berkaitan erat dengan hasil yang diinginkan, (2) Objektif, (3) Lengkap, (4) Tepat pada waktunya, dan (5) Dapat diterima.

Sedangkan menurut Likert yang dikutip oleh Sulistyorini dalam bukunya, suatu pengawasan akan berfungsi secara efektif, jika:

- a. Pengawasan harus memungkinkan manajer dan para pegawainya merencanakan dan mengukur prestasi kerjanya, sehingga keputusannya dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan dan perkiraan yang dapat diinformasikan.
- b. Suatu pengawasan harus memungkinkan para manajer mendeteksi deviasi dari standar yang ada pada waktu mengerjakan kontrol tersebut.
- c. Pengawasan harus memungkinkan sebagai alat untuk menetapkan penghargaan, penyeleksian, dan kompensasi berdasarkan suatu prestasi kerja yang sebenarnya, daripada berdasarkan perkiraan.
- d. Pengawasan harus dapat menjadi motivasi yang merangsang untuk mencapai prestasi yang baik.
- e. Pengawasan mampu sebagai media komunikasi yang mencakup konsep-konsep umum untuk membicarakan kemajuan organ (Syaifullah MS, 2021).

KESIMPULAN

Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Manajemen keuangan pendidikan Islam mencakup tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan (*budgeting*), pelaksanaan (*accounting*), dan penilaian (*auditing*) atau evaluasi/ pertanggungjawaban. Manajemen keuangan sekolah perlu memerhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Penyusunan anggaran merupakan gambaran setiap kegiatan yang direncanakan sekolah agar dapat menentukan satuan biaya di setiap kegiatan sehingga membantu dalam mengarahkan lembaga pendidikan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Kepala sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Pelaksanaan

anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan bisa dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Sopiali. 2018. "Teori Konsep Dasar Pembiayaan (Cost) dalam Pendidikan Islam", IAIN Surakarta: *Jurnal Intelegensia*, Vol. 06, No. 2, : 107. <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v6i2.1452>
- Ahmad Munir. 2013. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam", UIN Malik Ibrahim Malang: *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 8, No. 2, : 225. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>
- Aminatul Zahroh. 2017. *Total Quality Management: Teori & Praktik Manajemen untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media: 161.
- Arwildayanto, dkk., 2017. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, Jawa Barat: Widya Padjadjaran : 24.
- Daharis, A., Rizal, D., Stiawan, T., & Iskandar, M. Y. (2023). Analysis of the Use of Technology from the Perspective of Islamic Family Law in Era 4.0. *Jurnal Elsyakhshi*, 1(1), 33-46. <https://doi.org/10.35316/jpii.v2i2.76>
- Feiby Ismail. 2020. "Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara" IAIN Manado: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1: 9. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>
- Inten Nurmalasari. 2019. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Bandung", UIN Sunan Gunung Djati Bandung: *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1: 8. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v5i1.1626>
- Iskandar, M. Y., Bentri, A., Hendri, N., Engkizar, E., & Efendi, E. (2023). Integrasi Multimedia Interaktif Berbasis Android dalam Pembelajaran Agama Islam di Sekolah Dasar. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4575-4584. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.5021>
- Irawan & Ahmad Noval, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Swasta: Studi Kasus di MTs Wihdatul Fikri Kab. Bandung", UIN Sunan Gunung Djati Bandung: *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 79. <https://doi.org/10.23917/jmp.v14i1.7051>
- M. Hidayat Ginanjar, dkk. 2020. "Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Islam Hasmi Tamansari Bogor", STAI Al-Hidayah Bogor: *Jurnal Pendidikan*, Vol. 03, No. 04: 77
- Marlena, R., Cahya, M., Iskandar, M. Y., & Yusrial, Y. (2023). Methods for Memorizing the Quran for Higher Education. *Ahlussunnah: Journal of Islamic Education*, 2(2), 77-82. <https://doi.org/10.58485/jie.v2i2.210>
- Matula D. Phylisters. 2018. "Financial Management for Effective Schools: Bridging Theory and Practice through Competency Development among Secondary School Principals in Kitui County, Kenya", University of Nairobi: *International Journal of Education and Research*, Vol. 6 No. 11: 5.
- Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga: 163. https://books.google.co.id/books?id=aM9sPgAACAAJ&dq=intitle:MANAJEMEN+PENDIDIKAN&hl=&source=gbs_api
- Muslan, M., Kaewkanlaya, P., Iskandar, M. Y., Hidayati, A., Sya'bani, A. Z., & Akyuni, Q. (2023). Making Use of Ispring Suite Media in Learning Science in Junior High Schools. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education*, 6(4), 181-187.
- Nur Gamar. 2019. "Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan", IAIN Sultan Amai

- Gorontalo: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1: 13.
- Nur Rahmah. 2016. "Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah", IAIN Palopo: *Journal of Islamic Education Management*, Vo.1, No.1, : 75.
<https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.430>
- Nur Rahmah. 2016. "Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah" hlm. 76
- Rahawarin, Y., Taufan, M., Oktavia, G., Febriani, A., Hamdi, H., & Iskandar, M. Y. (2023). Five Efforts in building the character of students. *Al-kayyis: Journal of Islamic Education*, 1(1), 37-44.
- Ramayulis & Mulyadi. 2017. Manajemen dan Kepemimpinan Kependidikan Islam, Jakarta: *Kalam Mulia*: 109. <https://doi.org/10.46576/jsa.v2i1.119>
- Rita Pusvitasari & Mukhamad Sukur. 2020. "Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan", IAIN Tulungagung: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 04 No. 01: 98.
- Sulistiyorini. 2009. *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Teras:130.
- Sulistiyorini. 2009. Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi, hlm. 131.
- Syaifulallah MS. 2021. "Manajemen Keuangan Pendidikan", UIN Datokarama Palu: *Journal of Pedagogy*, Vol. 4, No. 1: 16. <https://doi.org/10.56488/scolae.v4i1.86>
- Tulusmono. 2012. "Manajemen Kesiswaan dan Manajemen Keuangan di Madrasah dan Sekolah Islam", MTs N Salatiga: *Mudarrisa*, Vol. 4, No. 2, : 173.
<https://doi.org/10.61689/inspirasi.v2i1.48>
- Tulusmono. 2012. "Manajemen Kesiswaan dan Manajemen Keuangan di Madrasah dan Sekolah Islam" hlm. 176-177. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v2i1.48>
- Tulusmono. 2012. "Manajemen Kesiswaan dan Manajemen Keuangan di Madrasah dan Sekolah Islam" hlm. 177-179
- YaPEIM Manegement Academy. 2013. Islamic Management the Application of Quranic Principles & Values, Kuala Lumpur: *Akademi Pengurusan YaPEIM*: 5

***Suroso (Corresponding Author)**

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 5114, Indonesia
Email: suroso22048@mhs.uingusdur.ac.id

Slamet Untung

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 5114, Indonesia
Email: slamet.untung@uingusdur.ac.id

Moh. Muslih

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 5114, Indonesia
Email: moh.muslih@uingusdur.ac.id

Copyright holder :

© Suroso., Untung, S., Muslih, M.

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA